

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI
GULA SEMUT**

**(Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Hargorejo,kecamatan kokap ,Kabupaten
Kulon Progo pada tahun 2018)**

Mohammad Ilham Kurniawan

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Poltik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Email: mohammad.ilham.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Dalam rangka mengetaskan kemiskinan Gerakan Bela Beli Kulonprogo merupakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kulon Progo 2011-2016 serta sesuai dengan pasal 5 UU No 25 Tahun 2004. Program Bela-beli kulonprogo merupakan suatu program yang berbasis *collaborative governance* yang dalam pelaksanaannya melibatkan tiga actor yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Untuk mencapai hal tersebut Industri pertanian yang di kembangkan dengan program OVOP (One Village One Product) merupakan solusi yang tepat untuk dikembangkan untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini Desa hargorejo sebagai salah satu desa yang produktif dalam memproduksi gula semut .Produksi gula merah di desa Hargorejo bisa dikatakan banyak dan produktif. Dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta Meberdayakan Sumber Daya Alam yang ada. Namun dalam pelaksanaannya peran BUMDes, Swasta, Dinas terkait, dan Masyarakat sekitar desa Hargorejo sebagai komponen *stakeholder* masih banyak menemui kendala dilapangan walaupun kegiatan Agroindustri tetap berjalan.

Kata kunci: *Collaborative governance*, Agroindustri, Gula Semut.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Agroindustri gula semut merupakan bentuk inovasi olahan hasil pertanian yang dahulu merupakan Gula merah. Hasil olahan gula merah menjadi gula semut dinilai lebih higienis dan ekonomis sehingga dapat lebih mudah dipasarkan diluar daerah kabupaten Kulonprogo. Selain itu permintaan ekspor gula semut di pasar internasional terbilang cukup tinggi sehingga agroindustry gula semut dapat di kembangkan lebih maju lagi karena memiliki potensi yg besar untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat d kabupaten Kulon progo. Agroindustri gula merah sendiri sudah berlangsung sejak tahun 1985 atau sudah 42 tahun berjalan. Produksi gula merah di desa Hargorejo bisa dikatakan banyak dan produktif. Dikatakan banyak karena banyak dari masyarakat mencari sesuap nasi dengan memproduksi gula merah. Kemudian dikatakan produktif karena jumlah produksi gula merah di Hargorejo bisa terbilang *continue* atau terus menerus memproduksi setiap harinya.

Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan dalam penerapan program tersebut masih menemui kendala di antaranya tingkat angka kecelakaan kerja yang tinggi dan kurang minatnya para generasi muda daerah untuk terjun menjadi penderes gula kelapa. Menurut Bapak Hastowardoyo selaku Bupati di Kabupaten Kulon progo Tingginya angka kecelakaan kerja pada penderes gula kelapa di kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 mencapai 20 orang korban. Di desa Hargorejo produksi gula semut merupakan yang terendah diantara Desa lain yang terdapat di Kecamatan Kokap kabupaten Kulon progo. Selain itu Pemerintah kabupaten Kulonprogo yang telah melaukan intenstas dalam pengembangan agroindustri melalui program OVOP masih menemui kendala dilapangan yang berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon progo perolehan pendapatan gula kelapa di kecamatan kokap sempat mengalami penurunan yaitu dari 4.685.310 (Kg) pada tahun 2015 turun menjadi 4.490.640 (Kg) di tahun 2016 (BPS, D.I.Yogyakarta 2016). penurunan hasil gula kelapa ini tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi penurunan produksi gula semut karena gula jawa merupakan bahan baku utama dalam industri gula semut.

. Pemerintah tentunya telah menangani permasalahan tersebut melalui pengembangan agroindustri secara *Collaborative governance* yang melibatkan pihak pemerintah sendiri, swasta, dan masyarakat . Hanya saja pendekatan yang dipilih pemerintah daerah lebih kepada pendekatan kuratif yang dimana seperti contoh kasusnya regulasi yang dimaksud adalah upaya bantuan kuratif terhadap penderes yang mengalami kecelakaan kerja. Kebijakan kuratif yang digunakan dengan mengaplikasikan bantuan sosial bagi para penderes yang mengalami kecelakaan dan sosialisasi terhadap alat bantu produksi yang dinilai kurang memberikan motivasi dan juga penguatan terhadap perilaku kerja. Berdasarkan latar belakang diatas, diperlukanya langkah antara Pemerintah, BUMDes, dan Pihak Swasta dalam pengambilan strategi . Dengan demikian penulisan skripsi ini secara lengkapnya ditulis dengan judul “Collaborative Governance dalam upaya Pengembangan Agroindustri Gula Semut” (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hargorejo, Kecamatan kokap, Kabupaten *Kulonprogo*) ”.

KERANGKA TEORI

1) Collaborative Government

Collaborative Government adalah kerjasama antara publik dan privat yang berkemungkinan aktifitas yang dilakukan individu atau kelompok organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang atau fungsi tertentu yang diakui keberadaanya dalam kelompok sosial demi tercapainya tujuan yang di tentukan. Menurut Sullivan dan Skelcher (Zaenuri, 2016), terdapat faktor kunci untuk membangun kapasitas kolaborasi antara lain: komunikator yang terampil dan memainkan peran penting dalam membangun hubungan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama, dan membuat *link* yang kuat antara para pemangku kepentingan yang didasarkan pada kapasitas individu dan kapasitas organisasi. Selain itu, terdapat enam kriteria yang penting dalam *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, (Sulistyoningsing, 2013), yaitu :

- a) Forum dimana forum diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga.
- b) Peserta forum termasuk pelaku non-negara (lembaga privat).

- c) Peserta terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan serta tidak hanya berkonsultasi dengan lembaga publik.
- d) Forum terjadi secara resmi, terorganisir, dan bertemu secara kolektif.
- e) Forum memiliki tujuan untuk membuat keputusan dengan kesepakatan bersama atau konsensus (bahkan jika tidak mencapai konsensus pada prakteknya).
- f) Kebijakan berfokus pada kebijakan publik atau publik manajemen.

Terdapat beberapa tahapan untuk mencapai kolaborasi antar *stakeholder*. Menurut Roberts (Zaenuri, 2018), kolaborasi merupakan tahapan terakhir dari jejaring yang tidak formal. Tahap awal adalah jejaring yang bersifat tidak formal yang selanjutnya berkembang melalui koordinasi, kooperasi hingga akhirnya sampai pada kolaborasi. Jejaring bersifat tidak formal, hanya sekedar bertukar informasi untuk saling menguntungkan, tidak ada saling bertukar sumber daya yang diperlukan. Sedangkan kolaborasi sudah sampai pada tahap peningkatan kapasitas organisasi secara formal untuk mencapai tujuan yang sama, kerjasama sudah terbagi mengenai sumberdaya dalam menanggung risiko, tanggung jawab, dan manfaat.

2) Pengembangan Agroindustri

Pengembangan Agroindustri adalah merupakan upaya pemanfaatan sumber daya tanah dan air, serta hayati secara produktif dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, bahan baku industri, ekspor dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Menurut Soeharjo (1991), Agroindustri merupakan pengolahan hasil pertanian dan karena itu agroindustri merupakan bagian dari enam subsistem agribisnis yang disepakati selama ini yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil (agroindustri), pemasaran, sarana dan pembinaan.

Namun Menurut Mosher (1966), pertanian dan agroindustri dijelaskan lebih detail menurut Mosher pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis,

sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya. Kemudian secara umum agar pengembangan agroindustri dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan beberapa pra-syarat, sebagai pra-kondisi bagi pengembangannya. Jika dilihat lagi apa yang diungkapkan Mosher dalam literatur klasik “*Getting Agriculture Moving*”, maka apa yang dimaksudkannya sebagai syarat pokok dan syarat pelancar, merupakan salah satu syarat keharusan bagi pengembangan agroindustri di suatu wilayah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif desk adalah pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Nawawi, 1990:63). Dalam penelitian ini Analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan secara kualitatif. Jadi dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana proses collaborative government dalam upaya Pengembangan Industri gula semut di desa Hargorejo.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusions).

PEMBAHASAN
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANAN AGROINDUSTRI
GULA SEMUT

**(Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Hargorejo,kecamatan kokap ,Kabupaten
Kulon Progo pada tahun 2018)**

1. Membangun visi bersama (*shared vision*)

Pada poin pertama ini akan dipaparkan analisis terkait tahapan membangun visi bersama. Dalam sebuah kolaborasi visi bersama sangat diperlukan membangun kepercayaan antar stakeholder. Terkait kolaborasi antara pihak pemerintah, BUMDes, dan kelompok usaha harus ada rasa percaya satu dengan yang lain. Berikut visi impian yang ada pada setiap stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Agroindustri gula semut. Berdasarkan indikator membangun visi bersama Sesuai dengan yang di sebutkan didalam data gambaran umum Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo.

Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Kulon Progo memiliki impian atau visi Terwujudnya Koperasi dan UMKM Yang Tangguh dan Berdaya Saing menuju Kemandirian, Keadilan serta Kesejahteraan Masyarakat. yang dimaksud dalam visi ini yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo memiliki tujuan untuk Terwujudnya hasil kinerja baik dari segi perekonomian masyarakat yang dapat diukur secara nyata dan konkrit yang menunjukkan peningkatan atau perbaikan dari tahun ke tahun berdasarkan target indikator kinerja yang direncanakan.

Sedangkan pada BUMDes desa hargorejo memiliki visi Pembangunan Desa Hargorejo yang Berdasarkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan YME dan Budi Pekerti Luhur Sehingga Terwujud Semangat Gotong Royong Demi Tercapainya Masyarakat yang Adil, Makmur, Tenteram, Mandiri dan Sejahtera. Di mana dalam visi BUMDes Desa Hargorejo memiliki tujuan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Hargorejo melalui semangat ekonomi kerakyatan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, Budi pekerti luhur dan semangat Goton Royong.

Pada indikator membangun visi bersama UD. Sumber Rejeki memiliki visi atau impian Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan pemanfaatan Sumber Daya Alam semaksimal mungkin yang dimana memiliki tujuan untuk dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan semaksimal mungkin yang dalam hal ini UD.Sumber Rejeki melakukan Inovasi peningkatan nilai produk melalui pengolahan gula jawa menjadi gula semut yang memiliki nilai jual lebih tinggi di pasaran

2. Partisipasi (*Participative*)

Partisipasi di dalam Collaborative Governance merupakan adanya keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan Agroindustri gula semut yang dimana terdapat struktur yang jelas antar stakeholder. Serta adanya partisipasi aktif sebagai syarat mutlak agar proses governance dapat berlangsung. Hal ini didasari oleh adanya visi bersama diantara stakeholder yang memungkinkan setiap komponen akan melakukan partisipasi secara sukarela tanpa diperintah. Berikut tabel kegiatan yang diantara *stakeholder* .

Dalam Indikator partisipasi BUMDes Hargorejo memiliki peran dalam kegiatan agroindustri gula semut sebagai pelaksana operasional yang dimana memiliki tugas untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran. Memberikan laporan tahunan kepada Lurah Desa Hargorejo tentang keadaan serta perkembangan BUM Desa dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUM Desa.

Hal ini sudah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain itu dari pihak BUMDes Hargorejo juga rutin menjalankan *controlling* produksi gula semut dimana BUMDes Hargo rejo meninjau produksi gula semut dan melaporkannya kepada Lurah Desa Hargorejo. Namun sejauh ini peran BUMDes Hargoejo belum dapat dikatakan Maksimal karena masih banyak program yang belum terlaksana diantaranya

Pemasaran produk gula semut ke luar negeri dan pemberian bantuan berupa pemberian pupuk Organik

3. Jejaring (*Network*)

Pada Indikator Jejaring, indikator ini tidak boleh menciptakan hirarki karena hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan, dan struktur jaringan harus terorganisir dengan struktur organisasi yang seminimal mungkin, agar tidak ada hirarki kekuasaan, monopoli, dominasi, agar terciptanya kesetaraan baik dari tanggungjawab, kewajiban, kesempatan untuk aksesibilitas dan otoritas. Kolaborasi dalam Agroindustri gula semut di desa Hargorejo melibatkan tiga instansi yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, BUMDes Hargorejo, dan UD.

Sumber Rejeki. Dinas Koperasi dan UMKM selaku pemegang izin produksi dan pemasaran produk Gula Semut Sumber Rejeki berkerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa Hargorejo selaku pemegang izin Pengelolaan Izin Pengusahaan yang tercatat di dalam Akta kerjasama pendirian usaha No : 503/208/BH/21/2009 pada maret 2009 yang berisi tentang ijin produksi pembuatan gula semut yang dimana Dinas Koperasi dan UMKM diberi kewenangan oleh Pemerintah Daerah untuk turut mengembangkan dan mengelola produk unggulan daerah.

Dimana dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan BUMDes Hargorejo dan Dinas Kesehatan untuk membantu para pengrajin gula semut untuk mendapatkan ijin produksi oleh Badan POM, yang dimana produk gula semut sumber rejeki telah mendapatkan ijin P-IRT dengan Nomor 2093401140488-22(. P-IRT merupakan sertifikat pangan untuk produsen pangan (makanan serta minuman) yang dibuat oleh industri skala rumah tangga, yakni perusahaan pangan yang mempunyai area usaha di hunian dengan peralatan pengolahan pangan manual sampai semi otomatis.

Berdasarkan Hasil temuan dilapangan dari segi jejaring (*Network*) yang ada di antara stakeholder dinilai cukup baik berupa kegiatan-kegiatan Ada controlling dari pihak Dinas terkait berupa pembuatan ijin edar BPOM serta promosi produk dari BUMDes Hargorejo dan kegiatan pengabdian masyarakat yang rutin dilakukan oleh

Universitas berupa penelitian, pemberian alat bantu produksi. Hal ini dibuktikan Dinas Kesehatan setiap 2 tahun sekali rutin melakukan bantuan pembuatan ijin ulang PIRT dari Badan POM yang berguna sebagai syarat agar produk olahan gula semut dapat di edarkan secara nasional. Sejauh ini proses kolaborasi dari segi jejaring dapat dikatakan sudah baik karena setiap stake holder sudah menjalankan tugasnya berdasarkan wewenangnya masing-masing.

4. Kemitraan (*partnership*)

Dalam Indikator Kemitraan akan di jelaskan tentang bagaimana terjalannya kemitraan antara stakeholder yang terlibat dalam urusan agroindustri gula semut. Adanya konsep kolaborasi yang menunjukkan adanya skala dan tingkat intensitas. Bagaimana terjalannya partisipasi yang memunculkan kemitraan dan bentuk kerjasama antara stakeholder .

Kolaborasi antara institusi pemerintah dengan institusi bisnis, dalam hal ini peran kemitraan pemerintah Melalui BUMDes berperan dalam menjembatani diantara *stakeholder* yaitu pihak pengusaha yang disini merupakan UD. Sumber Rejeki dengan Masyarakat setempat dan petani kelapa yang berperan di dalam proses kegiatan Agroindustri gula semut. Di dalam Kolaborasi ini Pemerintah Daerah Melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Kesehatan melakukan bantuan kerjasama berupa pembuatan Izin edar produk gula semut Dimana melalui kemitraan tersebut mereka berharap akan dinilai positif oleh warga, misalnya dianggap memiliki upaya serius untuk menjadi lebih efisien, tanggap, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik.

Dilain sisi, motivasi institusi bisnis yang utama yaitu melakukan kemitraan pada umumnya adalah untuk mengakses sumberdaya yang ada pemerintah. Serta menaikkan kualitas nilai jual produk gula semut Melalui kemitraan ini memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya yang tersedia di institusi pemerintah yang dapat digunakan untuk mengatasi sejumlah permasalahan publik yang sering terjadi disekitarnya.

Kedua, Kemitraan diantara pemerintah dan institusi masyarakat sipil. Dalam hal ini Kemitraan yang dibangun antara pemerintah dengan institusi masyarakat sipil

yang pendiriannya disponsori oleh pemerintah cenderung lebih banyak bergerak pada kegiatan-kegiatan yang menjadi kepedulian pemerintah. Dalam hal ini pemerintah melalui Gerakan OVOP (One Village One Product).

Melalui ipres No.6 Tahun 2007 Tentang percepatan pengembangan sektor rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan melakukan kolaborasi dengan institusi yang dimana pendiriannya disponsori pemerintah di harapkan dapat memberdayakan institusi tersebut dan menjadikannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam merespon isu tertentu atau dalam menyebar luaskan nilai-nilai dan kepentingan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan sosialisasi keselamatan kerja dengan para petani penderes di desa Hargorejo dan kegiatan ini sudah berlangsung lama

Ketiga, Kemitraan tiga sektor. Kemitraan tiga sektor pada umumnya karena dorongan oleh pencampuran antara motif *self-interest* dengan tujuan keinginan untuk mewujudkan kebaikan bersama (Selsky & Parker dalam Dwiyanto 2011: 289).

Ketiga sektor ini cenderung menyatakan bahwa kerjasama diantara *stakeholder* dilatar belakangi oleh dorongan untuk menjawab berbagai masalah sosial yang semakin kompleks dan tidak mampu untuk diselesaikan oleh masing-masing institusi ataupun oleh kerja sama diantara pemerintah dengan salah satu sektor lainnya.

Dalam hal ini Pemerintah daerah melalui BUMDes melakukan kegiatan Bimbingan dan pelatihan keselamatan kerja untuk para petani penderes gula kelapa oleh Pemerintah Daerah melalui BUMDes Hargorejo selain itu *collaborative governance* dalam agroindustri gula semut motif *self-interest* terdapat pada munculnya gerakan Bela-beli Kulon progo yang dimana produk gula semut diangkat menjadi produk unggulan daerah.

Hal ini dikarena gula semut sendiri dinilai memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta permintaan pasar yang *continue* sehingga diharapkan mampu untuk membuka lapangan pekerjaan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada namun gerakan tersebut nampak belum berpengaruh signifikan bagi jumlah produksi gula semut di desa hargorejo. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perolehan hasil produksi gula semut di bawah ini :

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil analisis terkait dengan *collaborative governance* dalam pengembangan Agroindustri Gula semut di Kabupaten Kulon Progo dari empat indikator keberhasilan kolaborasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada indikator Membangun visi bersama (*shared vision*) Terdapat tujuan bersama diantara *stakeholder* yang sama yaitu membuka lapangan pekerjaan dan mengoptimalkan Sumber Daya Alam yang ada. Selain itu terdapat gerakan Bela-beli Kulon progo yang ikut mendorong berlangsungnya visi tersebut. Pada Indikator Partisipasi (*Participative*), Terdapat partisipasi aktif diantara *stakeholder* berupa pembagian tugas dan wewenang masing di tiap *win-win solution* diantara stakeholder namun dalam bentuk yang tidak terikat.

Pada tahapan indikator Jejaring (*Network*) tidak ada hirarki diantara stakeholder hal ini berdampak positif karena dengan tidak adanya hirarki mengikat tentungan tidak ada dominasi diantara stakeholder dan koordinai dapat berjalan dengan efisiensi serta adanya kegiatan rutin yang dilakukan Dinas Kooperasi dan UMKM berupa pembuatan ijin edar BPOM serta promosi produk dari BUMDes Hargorejo dan kegiatan pengabdian masyarakat yang rutin dilakukan oleh Universitas berupa penelitian, pemberian alat bantu produksi. Tentunya dapat menjadi bukti yang kuat bahwa pada indikator ini sudah berjalan dengan baik.

Pada tahapan Kemitraan (*Partnership*), terdapat kemitraan yang terjalin antar stakeholder berupa kerjasama dengan universitas yaitu pengembangan alat, penelitian tentang produk yang telah dibuat, pengembangan alat produksi yang belum dimiliki oleh UD. Sumber rejeki Atau dalam kata lain lebih ke teknologi dan penelitian. seperti yang membahas tentang apa yang dibutuhkan oleh petani dan apa yang dibutuhkan oleh UD. Sumber rejeki. Namun pada tahapan ini terdapat kendala yaitu pada tugas dan wewenang BUMDes yang dapat dikatakan belum maksimal karena peran yang dilakukan BUMDes masih pada taraf penajakan serta komunikasi pada pihak pengrajin gula semut.

SARAN

Berdasarkan pada indikator Membangun visi bersama (*shared vision*) tujuan dinantara *stakeholder* sudah sesuai. Namun kedepannya Pemerintah lebih baik membagi kewenangan dengan *stakeholder* dalam memutuskan sebuah keputusan agar tidak mendominasi dalam setiap keputusan yang akan diputuskan. Agar terciptanya tujuan bersama yang dilandasi visi yang jelas. Pada Indikator partisipasi peran BUMDes kedepannya agar bisa lebih menjaga komitmen dengan pihak swasta dimana disini pihak UD. Sumber Rejeki untuk menjalin kerjasama agar tidak hanya sebatas kerjasama dalam permodalan tapi dalam hal lain BUMDes perlu melibatkan swasta. Serta di perlukanya konsistensi untuk kegiatan yang sudah ada agar terciptanya partisipatif diantara *stakeholder*.

Pada indikator jejaring (*networking*) Kedepannya perlu peran BUMDes untuk bisa lebih menjaga komitmen dengan pihak swasta untuk menjalin kerjasama agar tidak hanya sebatas kerjasama dalam permodalan tapi dalam hal lain BUMDes perlu melibatkan swasta. Kemitraan (*Partnership*) Pada indikator ini diperlukan pengembangan teknologi dan penelitian lebih lanjut . seperti yang meneliti tentang apa yang dibutuhkan oleh petani dan apa yang di butuhkan oleh UD. Sumber rejeki serta promosi produk oleh BUMDes. Untuk meningkatkan hasil kualitas produksi dan kapasitas produk

DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Zaenuri, M. (2018). *Tata Kelola Pariwisata-Bencana Berbasis Collaborative Governance; Konsep, Analisis dan Pemodelan*. Yogyakarta : Explore.
- Dwiyanto, A. (2013). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Gramedia Pustaka Utama.
- Van Aartsen, J. (1953). Agricultural Geography. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geo-graphie*, 44, 27-28.
- Santoso, H., Hartono, R., & Savitri, S. L. (2010). Potensi Agroindustri Berdasarkan Kinerja Usaha Dan Strategi Pengembangannya. *Agricultural Socio-Economics Journal*, 10(3), 177.
- Wanna, J. (2008). Collaborative government: meanings, dimensions, drivers and outcomes. *Collaborative governance: a new era of public policy in Australia*, 3-12.
- Mardiharini, M., & Jamal, E. (2016). Kinerja dan Prospek Pengembangan Agroindustri dalam Perspektif Pembangunan Pertanian Nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(1), 75-86.
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, M. (2016). Kinerja kelembagaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM). *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 29(1), 14-21.
- Kencono, D. S., & Supriyanto, E. E. COLLABORATIVE GOVERNANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIA: THE CASE OF DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PROVINCE. *The 2nd Journal of Government and Politics*, 449.